



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR
125 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka perlu ditetapkan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 125) diubah selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,


ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG UTARA NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TAHUN 2019-2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.		Indeks Pendidikan	$(RLS+HLS)/2$	Data didapat dari hasil perhitungan BPS	Nilai indeks	N/A	10,37	10,39	10,56	10,61	BPS
2.		Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Data didapat dari hasil perhitungan BPS	Nilai indeks	N/A	69,37	69,53	69,69	74,00	BPS
3.		Rasio warisan budaya daerah yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	Data jumlah cagar budaya yang dilestarikan didapat dari hasil kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya Data terkait jumlah cagar budaya didapat dari dokumen penetapan cagar budaya	%	N/A	88,31	89,63	90,97	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
4.		Indeks Keharmonisan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik kerukunan umat beragama yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik kerukunan umat beragama}} \times 100\%$	<p>Data jumlah kasus konflik kerukunan umat beragama yang tertangani didapat dari hasil kegiatan penanganan konflik umat beragama</p> <p>Data jumlah kasus konflik kerukunan umat beragama didapat dari data jumlah konflik kerukunan umat beragama dalam satu tahun</p>	%	N/A	95,77	96,73	97,7	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.		Rasio organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif dan Terbina oleh Pemda}}{\text{Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Terdata Tahun n}} \times 100\%$	<p>Data jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dan terbina didapat dari jumlah organisasi kepemudaan yang terbina lewat kegiatan-kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan</p> <p>Data jumlah organisasi kepemudaan yang terdata didapat dari data jumlah jumlah organisasi kepemudaan yang tercatat oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	%	N/A	15	20	25	55	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
6.		Indeks Prasarana Wilayah	$\frac{\text{Persentase capaian Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi} + \text{persentase tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota} + \text{persentase ketersediaan menara terhadap kebutuhan menara} + \text{persentase tingkat ketersediaan signal internet dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Utara} + \text{persentase bangunan terminal kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Tipe C)} + \text{persentase sarana olahraga dalam kondisi baik} + \text{persentase bangunan SD dalam kondisi baik} + \text{persentase bangunan SMP dalam kondisi baik}}{8}$	Data capaian Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota, ketersediaan menara terhadap kebutuhan menara, Tingkat Ketersediaan signal internet dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Utara, bangunan terminal kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Tipe C), sarana olahraga dalam kondisi baik, Bangunan SD dalam kondisi baik, bangunan SMP dalam kondisi baik didapat dari hasil perhitungan oleh Dinas Koumikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas	%	N/A	76,74	80,58	84,61	84,61	Dinas Koumikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang							
7.		Indeks Sarana Wilayah	Persentase capaian Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, Persentase Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota (Konektivitas Wilayah Kab./Kota) + persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak + persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun + persentase tersedianya informasi mengenai RTRW wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui analogi dan peta digital + persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang di kelola secara layak	Data capaian Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, Persentase Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota (Konektivitas Wilayah Kab./Kota), Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak, Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun, Persentase tersedianya informasi mengenai RTRW wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui	%	N/A	68,77	75,65	83,22	87,38	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
			6	analogi dan peta digital dan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang di kelola secara layak didapat dari perhitungan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan							
8.		Rasio kepatuhan Tata Ruang	$\frac{\text{Persentase capaian Kecamatan yang telah memiliki RDTR} + \text{persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana tata Ruang (RTRW) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui analogi dan peta digital} + \text{persentase Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20\% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan}}{3}$	<p>Data capaian persentase kecamatan yang telah memiliki RDTR didapat dari dokumen RDTR</p> <p>Data capaian persentase tersedianya Informasi mengenai Rencana tata Ruang (RTRW) wilayah Kabupaten/ Kota beserta rencana rincinya melalui analogi dan peta digital didapat dari dokumen RTRW</p> <p>Data capain persentase tersedianya luasan RTH</p>	%	56,76	58,83	64,71	67,64	71,34	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				public 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang							
9.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKL \times 40\%)$	Data capaian Indeks Kualitas Air didapat dari hasil uji lab Data capaian Indeks Kualitas Udara didapat dari hasil uji lab Data capaian Indeks Kualitas Lahan didapat dari hasil uji lab	Nilai Indeks	N/A	59,24	59,37	59,37	63,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.		Rasio Peningkatan Investasi	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{Jumlah investasi tahun n-1}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1}}$	Data jumlah investasi didapat dari rilis laporan realisasi investasi dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Lampung	Nilai Rasio	N/A	0,1	1,5	1,5	1,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.		Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB tahun n} - \text{Jumlah PDRB tahun n-1}}{\text{Jumlah PDRB tahun n-1}} \times 100\%$	Data jumlah PDRB didapat dari rilis yang dikeluarkan oleh BPS	%	N/A	2,52	2,65	2,82	4,25	BPS

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah PDRB tahun n-1								
12.		Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun n} - \text{Jumlah PAD Tahun n-1}}{\text{Jumlah PAD n-1}} \times 100$	Data jumlah PAD didapat dari penjumlahan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah.	%	N/A	6,86	7,2	7,56	7,94	Badan Pendapatan Daerah
13.		Indeks Keamanan	$(1 + (1 - (\text{Angka kejahatan Tahun n} / \text{Angka Kejahatan Tahun n-1}))) \times 100\%$	Data angka kejahatan didapat dari rilis BPS	%	N/A	94,9	95,37	96,8	100	BPS
14.		Indeks Resiko Bencana	Indeks bahaya (H) Indeks kerentanan (V) Indeks kapasitas (c) $R = (H \times V \times (1 - C))^{1/3}$	Data indeks resiko bencana didapat dari rilis BNPB yang tertuang dalam buku Indeks resiko bencana indonesia	Nilai indeks	N/A	110	115	125,50	131,20	BNPB
15.		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data diperoleh dari rilis nilai evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB	Tingkat Akuntabilitas	N/A	CC	B	B	B	Kemenpan RB
16.		Opini BPK	Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),	Data didapat dari rilis hasil pemeriksaan (opini BPK)	Opini	N/A	WDP	WTP	WTP	WTP	BPK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
			kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan. efektivitas sistem pengendalian intern.								
17.		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data nilai indeks profesionalitas ASN didapat dari aplikasi SIASN	Nilai indeks	N/A	N/A	N/A	60	65	BKPSDM
18.		Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal dan SPP	Rata-rata Persentase capaian SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantib linmas, sosial) + Persentase Capaian Kepatuhan Standar Pelayanan $\frac{\quad}{2}$	Data persentase capaian SPM diperoleh aplikasi e-SPM kementerian Dalam Negeri Data capaian nilai kepatuhan standar pelayanan didapat dari rilis Ombudsman RI	%	N/A	80,3	88,33	92,74	97,38	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Ombudsm an RI
19.		Rasio pertumbuhan ekonomi kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Tahun n -Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Tahun n-1 ----- $\times 100\%$ Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Tahun n-1	Data jumlah ekonomi kreatif didapat dari hasil pendataan	%	N/A	58,64	64,5	70,96	78,05	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20.		Persentase peningkatan pelaku usaha ekonomi	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibantu oleh pemerintah Tahun n - Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang	Data jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibantu oleh pemerintah didapat dari jumlah	%	N/A	54,22	56,93	59,78	62,77	Dinas Pariwisata dan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		kreatif yang di bantu oleh pemerintah daerah	dibantu oleh pemerintah Tahun n-1 ----- x 100% Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibantu oleh pemerintah Tahun n-1	pelaku ekonomi kreatif yang dibantu oleh Pemkab Lampung Utara							Kebudayaan

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & KESRA
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN
5.	ASS. BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN NUNGUM
7.	KEPALA BARPEDA

Pj.BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG UTARA NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

1. DINAS PENDIDIKAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya aksesibilitas,SD M dan sarana prasarana penunjang pendidikan	APM PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa jenjang PAUD Usia 5-6 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$	<p>Data jumlah siswa jenjang PAUD didapat dari aplikasi Dapodik</p> <p>Data jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun didapat dari data kependudukan</p>	%	34,87	35,21	35,57	39,52	40,28	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	Data jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun didapat dari data kependudukan							
		APM SMP	Jumlah siswa jenjang SMP Usia 13-15 Tahun ----- X 100% Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Data jumlah siswa jenjang SMP didapat dari aplikasi Dapodik Data jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun didapat dari data kependudukan	%	78,74	79,13	79,53	79,93	80,33	BPS
		Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B	Jumlah sekolah terakreditasi minimal B ----- X 100% Jumlah seluruh sekolah	Data jumlah sekolah terakreditasi minimal B didapat dari aplikasi Dapodik Data jumlah seluruh sekolah didapat dari aplikasi Dapodik	%	50	60	75	85	95	Dinas Pendidikan
		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS -----x 100% Jumlah warga negara usia 7-15 tahun	Data jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS didapat dari aplikasi Dapodik	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		SD/MI, SMP/MTS		Data jumlah warga negara usia 7-15 tahun kependudukan							
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah warga negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah warga negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	<p>Data Jumlah warga negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari aplikasi Dapodik</p> <p>Data Jumlah warga negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah</p>	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$	<p>Data jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD didapat dari aplikasi Dapodik</p> <p>Data Warga Negara Usia 5-6 Tahun kependudukan</p>	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikta t	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	60,50	61,00	BKPSDM

2. Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat	AKI	Jumlah Kematian Ibu karena hamil, bersalin, nifas pada tahun n ----- X 100.000 Jumlah kelahiran Hidup pada tahun yang sama	Data jumlah kematian ibu didapat dari rekapitulasi jumlah kematian ibu karena hamil, bersalin, nifas Data jumlah kelahiran hidup didapat dari data kependudukan	o/oooo	71	62	53	44	36	Dinas Kesehatan
		AKB	Jumlah kematian bayi (usia < 1 Tahun) tahun n -----X 1000 Jumlah kelahiran Hidup pada tahun yang sama	Data jumlah kematian bayi (usia < 1 Tahun) tahun n rekapitulasi jumlah kematian bayi	o/oo	2,7	2,5	2,3	2,1	1,55	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				Data jumlah kelahiran Hidup pada tahun yang sama diambil dari data rekapitulasi Jumlah kelahiran Hidup pada tahun yang sama							
		Persentase Success Rate (SR) Tuberkolosis	$\frac{\text{Jumlah Penderita Tuberkulosis BTA yang sembuh tahun n}}{\text{Jumlah Penderita Tuberkulosis diobati tahun n}} \times 100\%$	<p>Data jumlah Penderita Tuberkulosis BTA yang sembuh tahun n didapat dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan</p> <p>Data Jumlah Penderita Tuberkulosis diobati tahun n didapat dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan</p>	Persen	96	96,5	97	97,5	98	Dinas Kesehatan
		Insiden HIV	$\frac{\text{Jumlah infeksi baru HIV}}{1000 \text{ Jumlah penduduk tidak terinfeksi HIV}}$	<p>Data Jumlah infeksi baru HIV didapat dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan</p> <p>Data Jumlah penduduk tidak terinfeksi HIV didapat</p>	Permil	12	10	8	6	4	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan							
		Prevalensi Stunting	<p>Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek ----- X 100%</p> <p>Jumlah anak balita pada waktu sama</p>	<p>Data Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek Didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kemenkes</p> <p>Data jumlah anak balita didapat dari data kependudukan</p>	Persen	20	18	17	15	14	Kemenkes
		Prevalensi tekanan darah tinggi	<p>Jumlah penduduk umur lebih atau sama dengan 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmhg dan atau tekanan darah diastolic lebih dari atau sama dengan 90 mmhg pada waktu tertentu ----- X 100%</p> <p>Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun pada periode yang sama</p>	Data jumlah penduduk umur lebih atau sama dengan 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmhg dan atau tekanan darah diastolic lebih dari atau sama dengan 90 mmhg pada waktu tertentu didapat dari hasil rekapitulasi oleh dinas kesehatan	persen	45	40	35	30	19	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				Data Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun didapat dari data kependudukan							
		Prevalensi Diabetes Melitus	<p>Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun yang dilakukan pengujian DM dengan hasil sebagai penderita DM</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun pada periode yang sama</p>	<p>Data Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun yang dilakukan pengujian DM dengan hasil sebagai penderita DM didapat dari hasil rekapitulasi Dinas Kesehatan</p> <p>Data Jumlah penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun didapat dari data kependudukan</p>	persen	9	8,5	8	7,5	7	Dinas Kesehatan
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	CC	CC	B	B	B	Inspektorat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	61,65	62,00	BKPSDM

3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang terlayani oleh jaringan irigasi ----- ---- X 100% Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang terlayani oleh jaringan irigasi dan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten didapat dari data rekap oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi	persen	57,40	58,37	59,57	61,07	63,07	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi
2.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap ----- -----x100% Panjang selueuh jalan kabupaten	Data Panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap dan Panjang selueuh jalan kabupaten didapat dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi	persen	57,31	58,00	59,00	60,00	62,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatkan Penataan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antar sektor.	Persentase Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota (Konektivitas Wilayah Kab/Kota)	<p>Panjang jalan ke pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi</p> <p>-----x100%</p> <p>Target panjang jalan ke pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi</p>	Data Panjang jalan ke pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi dan Target panjang jalan ke pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi diperoleh dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi	persen	20,00	30,00	55,00	80,00	100,00	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina konstruksi
4.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	NA	NA	NA	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,00	53,50	BKPSDM

4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman ----- X 100% Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan jumlah penduduk didapat dari hasil berita acara perhitungan	persen	NA	NA	NA	20	25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun ----- X 100% Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun dan jumlah penduduk didapat dari hasil berita acara perhitungan	persen	NA	NA	NA	90	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase berkurangnya luasan	Jumlah luasan pemukiman kumuh	Data jumlah luasan pemukiman kumuh didapat dari Dinas	persen	NA	NA	NA	33	12	Dinas Perumahan Rakyat.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		permukiman kumuh di kawasan perkotaan (ha)	$\frac{\text{tahun } n - \text{jumlah luasan permukiman kumuh (n-1)}}{\text{Jumlah Luasan kawasan kumuh}} \times 100\%$	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang							Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
2.	Tersediannya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersediannya informasi mengenai RTRW wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui analogi dan peta digital	$\frac{\text{Jumlah informasi mengenai RTRW wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui analogi dan peta digital}}{\text{Jumlah informasi RTRW}} \times 100\%$	Data didapat dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Perse n	NA	NA	NA	65	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota yang terhubung}}{\text{Jumlah pusat kegiatan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	perse n	NA	NA	NA	80	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		wilayah kab/kota)									
		Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasaan perkotaan	Jumlah luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ----- X 100% Jumlah Luasan RTH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Perse n	NA	NA	NA	40	50	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah/sanitasi layak	Jumlah Penduduk yang terlayani sistem air limbah/sanitasi layak ----- X 100% Jumlah penduduk	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	perse n	NA	NA	NA	60	65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
3.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase jumlah masyarakat terlayani sistem drainase	Jumlah rumah tangga terlayani dengan Sistem drainase Tahun n ----- X 100% Jumlah rumah tangga Tahun n	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	perse n	50	40	50	70	90	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Persentase MBR yang memiliki	Jumlah MBR yang telah memiliki rumah Layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta	perse n	10	15	20	25	30	Dinas Perumahan Rakyat,

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		rumah layak huni	----- X 100% jumlah total rumah MBR	Karya dan Penataan Ruang							Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
		Terfasilitasi kasus pertanahan	Jumlah kasus pertanahan yang terfasilitasi ----- x100% Jumlah kasus pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Berita acara	2	2	1	1	6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
4.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	NA	NA	NA	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,00	53,50	BKPSDM

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta ketertiban umum	Persentase Jumlah penindakan terhadap pelanggaran Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilakukan penindakan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan}} \times 100\%$	<p>Data jumlah pelanggaran perda yang dilakukan penindakan didapat dari jumlah kegiatan penindakan</p> <p>Data jumlah pelanggaran perda didapat dari rekapitulasi laporan pelanggaran perda</p>	Perse n	100	100	100	100	100	Satpol PP
3.	Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$	<p>Data jumlah penyelesaian pelanggaran K3 didapat dari jumlah kegiatan penyelesaian pelanggaran K3</p> <p>Jumlah pelanggaran K3 didapat dari rekapitulasi laporan pelanggaran K3</p>	Perse n	100	100	100	100	100	Satpol PP
4.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemerintahan										
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	45,00	45,50	BKPSDM

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya kemampuan tanggap bencana Kabupaten Lampung Utara	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran WMK ----- X 100% Luas potensi kebakaran	Data luas wilayah manajemen kebakaran didapat dari data rekap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Data luas potensi kebakaran didapat dari data rekap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	perse n	73,34	85,56	85,56	85,56	85,56	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit ----- X 100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Data jumlah kasus kebakaran didapat dari hasil rekapitulasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah kasus kebakaran dalam	perse n	86,56	86,56	86,56	86,56	86,56	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				jangkauan WMK didapat dari rekapitulasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	50,00	51,00	BKPSDM

7. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan penanganan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	<p>Data jumlah PMKS yang Mandiri didapat dari data rekapitulasi oleh Dinas Sosial</p> <p>Data Jumlah PMKS didapat dari rekapitulasi Dinas Sosial</p>	persen	20	20	20	20	21	Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	55,88	56,00	BKPSDM

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Pengentasan Desa Tertinggal di Kabupaten Lampung Utara	Indeks Desa Membangun	Jumlah nilai Indeks Desa Membangun seluruh desa di Kabupaten Lampung Utara ----- Jumlah Desa di Kabupaten Lampung Utara	Data jumlah indeks desa membangun didapat dari SK Kementerian Desa tentang	nilai indeks	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	Kementerian Desa
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	43,71	45,00	BKPSDM

9. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase KSP/USP koperasi dinilai Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian}}{\text{Jumlah seluruh KSP/USP di Kabupaten Lampung Utara}} \times 100\%$	<p>Data jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian didapat dari hasil pelaksanaan kegiatan penilaian</p> <p>Data jumlah seluruh KSP/USP di Kabupaten Lampung Utara didapat dari data rekapitulasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja</p>	persen	25	30	35	40	50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{(\text{Jumlah UMKM tahun } n - \text{Jumlah UMKM tahun } n-1)}{\text{Jumlah UMKM tahun } n-1} \times 100\%$	Data jumlah UMKM didapat dari hasil rekapitulasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	persen	50	50	60	63	66	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Tersedianya Tenaga Kerja yang produktif, berkualitas dan berdaya saing tinggi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja ----- X 100% Jumlah penduduk usia kerja	Data capaian TPAK didapat dari hasil perhitungan BPS	persen	54,52	68,49	68,58	68,72	68,80	BPS
4.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53	53,5	BKPSDM

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indes Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan ----- 100% Indes Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki	Data capaian Indeks Pembangunan Gender didapat dari hasil perhitungan BPS	Nilai	N/A	68,15	69,86	71,6	73,34	BPS

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUA N TARGET					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani ----- X 100% Jumlah korban keseluruhan	Data jumlah anak korban kekerasan yang ditangani Didapat dari hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	Dinas Pembenda yasa Perempuan i dan Perlindungan dan anak
2.	Mewujudkan Profesionalism e dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akcip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Prelikat C	CC	B	B	B	Inspektorat ak
	Indeks Profesionalitas ASN di as ASN		Rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN di perangkat daerah	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	NA	INSPEKSI

11. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUA N TARGET					SUMBER DATA
					2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tercapainya Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan	Persentase realisasi pelaksanaan terhadap rencana program dan kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Program ----- X 100% Target Rencana Program	Data realisasi pelaksanaan program didapat dari laporan realisasi anggaran Dinas Kerubanan Pangan	%	90	90	90	90	Dinas Kerubanan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	Prasarana Pendukung			Data target rencana program didapat dari Renja							
2.	Meningkatnya Motivasi dan partisipasi masyarakat dalam penganekaragaman pangan, diversifikasi pangan dan gizi dan pola konsumsi pangan local yang dinamis	Persentase Pertumbuhan Cadangan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Cadangan pangan tahun } n - \text{Cadangan pangan tahun } n-1}{\text{Cadangan pangan tahun } n-1} \times 100\%$	Data cadangan pangan didapat dari data pada Bulog	%	10	10	10	13	13	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan	Persentase AKG x Bobot masing-masing kelompok pangan (skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian +.....)	Data capaian skor pola pangan harapan didapat dari hasil survei pola konsumsi	Nilai	86	86	86,5	87	90	Dinas Ketahanan Pangan
3.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akip	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,71	55	BKPSDM

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Lampung Utara yang bersih, indah dengan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola	Luas RTH yang dikelola -----x100% luas rth publik	Data RTH yang dikelola didapat dari hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Data RTH Publik didapat dari data pada Dinas Lingkungan Hidup	Persentase	0,073	0,074	0,075	0,077	0,079	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase luas cakupan area pelayanan persampahan	Luas cakupan area pelayanan persampahan yang tertangani ----- x 100% Luas cakupan area pelayanan persampahan	Data Luas cakupan area pelayanan persampahan yang tertangani didapat dari hasil pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Data luas cakupan area pelayanan persampahan didapat dari data pada	Persentase	26,91	26,91	26,91	30,43	30,43	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Ratio penduduk yang memiliki KK	Jumlah penduduk yang memiliki KK sampai tahun n ----- X 100% Jumlah Penduduk tahun n	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	100	100	100	100	100	Disdukcapil
		Ratio anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 thn kurang 1 hari yang memiliki KIA tahun n ----- X 100% Jumlah anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	10,72	18,42	30	32	35	Disdukcapil
		Ratio Bayi ber-Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0-12 Bulan yang memiliki akta lahir ----- X 100% Jumlah seluruh anak usia 0-12 Bulan	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	100	100	100	100	100	Disdukcapil
		Ratio Penerbitan Akte Perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan ----- X 100% Jumlah pengajuan akta	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	100	100	100	100	100	Disdukcapil
		Ratio Penerbitan Akte Perceraian	Jumlah penerbitan akta perceraian ----- X 100% Jumlah pengajuan akta	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	100	100	100	100	100	Disdukcapil
		Ratio Penerbitan Akte Kematian	Jumlah penerbitan akta kematian ----- X 100% Jumlah pengajuan akta	Data didapat dari aplikasi kependudukan Kemendagri	%	100	100	100	100	100	Disdukcapil
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyelenggaraan Pemerintahan		indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi								
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	60,91	61,00	BKPSDM

14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lampung Utara	Laju pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk pada akhir tahun n ----- x100% Jumlah penduduk pada awal tahun n	Data jumlah penduduk didapat dari data kependudukan	persen	0,8	0,5	0,6	0,7	0,8	BPS
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	56,28	56,5	BKPSDM

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
			indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin								

15. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas terminal	Jumlah terminal yang terpelihara ----- x 100% jumlah terminal kewenangan kabupaten	Data jumlah terminal yang terpelihara diambil dari data Dinas Perhubungan	persen	20	20	20	20	100	Dinas Perhubungan
		Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan/Transportasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan ----- x100% Kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Perhubungan	Data jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan diambil dari jumlah pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi di Dinas Perhubungan Data Jumlah kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan diambil dari data Informasi Jabatan Dinas Perhubungan	persen	20	20	20	20	39	Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Tersedianya kebutuhan kelengkapan jalan (rambu, marka, Apill, pagar pengaman jalan, RPPJ, halte,) Pos jaga perlintasan KA	kelengkapan jalan yang tersedia ----- x100% kebutuhan kelengkapan jalan	Data kelengkapan jalan diambil dari data rekap Dinas Perhubungan Data Kebutuhan kelengkapan jalan diambil dari data Dinas Perhubungan	persen	20	20	20	20	93	Dinas Perhubungan
		KIR kendaraan angkutan barang dan orang	Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR ----- x100% Jumlah kendaraan wajib uji	Data Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR diambil dari data yang terdapat pada Dinas Perhubungan Data jumlah kendaraan wajib uji diambil dari data yang terdapat pada Dinas Perhubungan	persen	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan uji kendaraan berbasis SMART CARD	Jumlah kendaraan yang teruji melalui SMART CARD ----- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji	Data Jumlah kendaraan yang melakukan uji smart card diambil dari data yang terdapat pada Dinas Perhubungan Data jumlah kendaraan wajib uji diambil dari data yang terdapat pada Dinas Perhubungan	persen	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	50,53	51,00	BKPSDM

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Nilai Perencanaan SPBE	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1,45	1,55	1,65	1,75	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Teknologi Informasi	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1,15	1,125	1,35	1,52	Kementerian Pendayagunaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		dan Komunikasi									unaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai penyelenggaraan SPBE	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1,4	1,5	1,6	2,52	Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1,25	1,35	1,45	3,05	Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya Pelayanan Pengamanan Persandian, informasi Publik dan Data Statistik	Nilai Penerapan Manajemen SPBE	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1,05	1,15	1,25	1,35	Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
											Reformasi Birokrasi
		Nilai Audit TIK	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	1	1,25	1,45	1,50	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	2	2,25	2,5	3,25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Nilai Layanan Publik Berbasis Elektronik	Perhitungan nilai indikator berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020	Data didapat dari hasil penilaian SPBE oleh KemenpanRB	Nilai indeks	1	2	2,25	2,5	3,35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	evaluasi oleh Inspektorat							
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	54,50	54,80	BKPSDM

17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan realisasi investasi	Realisasi investasi tahun n- Realisasi investasi tahun n-1 ----- x 100 Realisasi investasi tahun n-1	Data realisasi investasi didapat dari BKPM Data target realisasi investasi didapat target yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung	persen	10	20	30	40	50	DPMPSTSP
2.	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR tertimbang dari 9 unsur penilaian x 25	Data nilai SKM didapat dari hasil survei	Nilai Indeks	75,80	75,85	75,90	75,95	76	DPMPSTSP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	26	30	BKPSDM

18. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya peran aktif kepemudaan	Persentase pemuda dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh pemuda usia 16-30 tahun}} \times 100\%$	<p>Data jumlah pemuda yang dibina didapat dari jumlah pemuda yang menjadi peserta pembinaan (jumlah pemuda dalam organisasi, sosialisasi, penyaluran dll.)</p> <p>Data jumlah pemuda didapat dari data kependudukan</p>	persen	NA	NA	NA	15	15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,33	54,00	BKPSDM

19. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pariwisata Lampung Utara untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lampung Utara	Persentase cagar budaya dan warisan budaya lainnya yang dilestarikan	Cagar budaya yang dilestarikan tahunan ----- x 100% Jumlah cagar budaya	Data cagar budaya yang dilestarikan didapat dari rekap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Data jumlah cagar budaya didapat dari jumlah cagar budaya yang telah diresmikan	person	NA	NA	NA	70	75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	Data jumlah wisatawan didapat dari rekapitulasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	persen	NA	NA	NA	10	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB menurut sub sektor pariwisata tahun } n}{\text{Jumlah PDRB Tahun } n} \times 100\%$	Data PDRB didapat dari perhitungan BPS	persen	NA	NA	NA	1,36	1,36	BPS
	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,00	53,10	BKPSDM

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Lampung Utara	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	$\frac{(\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun } n) - (\text{Jumlah pengunjung tahun } n-1)}{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun } n-1} \times 100\%$	Data jumlah pengunjung perpustakaan diambil dari data register tamu perpustakaan daerah	persen	20%	25%	30%	35%	40%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Terwujudnya Profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tata Kelola Kearsipan Secara Baku	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baik dan benar}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	<p>Data jumlah OPD yang telah menerapkan kearsipan secara baik diambil dari hasil penilaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah</p> <p>Data jumlah perangkat daerah diambil dari Perbup 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara</p>	Persen	0,15 %	0,25%	0,5%	0,75%	0,85%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	52,2	52,5	BKPSDM

21. DINAS PERIKANAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya minat para pelaku usaha perikanan	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Bidang Perikanan	Jumlah PDRB menurut Lapangan Usaha bidang Perikanan Tahun n - Jumlah PDRB Tahun (n-1) ----- X 100% Jumlah PDRB s/d Tahun n	Data PDRB didapat dari perhitungan BPS	%	2,25	2,64	2,81	3,01	3,25	BPS
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi Ikan Tahun n - Jumlah produksi Ikan Tahun n-1 ----- X 100% Jumlah produksi Ikan Tahun n-1	Data produksi perikanan didapat dari rekapitulasi Dinas perikanan	%	9,1	9,1	9,1	9,1	9,6	Dinas Perikanan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	54,07	54,50	BKPSDM

22. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui penataan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian daerah	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan thdp PDRB	Jumlah PDRB menurut sub sektor tanaman pangan tahun n ----- X 100% Jumlah PDRB Tahun n	Data PDRB didapat dari perhitungan BPS	persen	NA	14,67	14,78	14,46	14,51	BPS

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Menciptakan pelayanan pemerintah yang bersih, transparan, profesional, akuntabel dan partisipatif; Meningkatkan pencapaian program kegiatan pembangunan	Meningkatnya tata administrasi perkantoran	Jumlah dokumen unsur administrasi perkantoran yang tercapai ----- X 100% Jumlah dokumen unsur administrasi perkantoran yang direncanakan	Data jumlah dokumen unsur administrasi perkantoran yang tercapai dan perkantoran yang direncanakan didapat dari hasil rekapitulasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	person	NA	70	75	80	85	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
4.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	60,20	60,25	BKPSDM

23. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui penataan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan potensi pertanian daerah (melalui sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan)	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Jumlah PDRB menurut sub sektor perkebunan tahun n ----- X 100% Jumlah PDRB Tahun n	Data jumlah PDRB sub sector perkebunan dan jumlah PDRB didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh BPS	perse n	NA	16,6	16,71	16,39	16,44	BPS
		Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Jumlah PDRB menurut sub sektor peternakan tahun n ----- X 100% Jumlah PDRB Tahun n	Data jumlah PDRB sub sector peternakan dan jumlah PDRB didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh BPS	Perse n	NA	4,7	4,81	4,49	4,54	BPS
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	38	38,5	BKPSDM

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar Daerah	Jumlah PAD Pasar Daerah ----- X 100% Target PAD Pasar Daerah	Data jumlah PAD pasar daerah didapat dari rekapitulasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Data target PAD pasar daerah didapat dari SK Penetapan Target PAD	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB menurut sub sektor perdagangan tahun n ----- X 100% Jumlah PDRB Tahun n	Data PDRB didapat dari hasil perhitungan BPS	%	12,58	12,68	12,78	12,88	12,98	BPS
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggara	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	BB	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	an Pemerintahan										
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,13	53,50	BKPSDM

25. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	Nilai LPPD tahun -n	Data capaian LPPD didapat dari hasil penilaian Kemendagri	Predikat	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kemendagri
		Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode e-purchasing	$\frac{\text{Jumlah pengadaan dengan metode e-purchasing}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$	Data jumlah pengadaan dengan e-purchasing didapat dari hasil rekapitulasi Bagian Pengadaan Barang Jasa Jumlah seluruh pengadaan didapat dari aplikasi SIRUP	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Produk Hukum yang Dipublikasi	Jumlah rancangan produk hukum yang dipublikasikan ----- X 100% Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Data jumlah rancangan produk hukum yang dipublikasikan didapat dari jumlah upload pada JDIH Jumlah produk hukum yang ditetapkan didapat dari buku register	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan bidang administrasi perekonomian BUMD dan BLUD ----- X 100% Jumlah kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan	Jumlah kebijakan bidang administrasi perekonomian dan jumlah kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan didapat hasil rekapitulasi Bagian Perekonomian Setdakab.	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
		Nilai IKM Kabupaten Lampung Utara	Rata-rata Nilai IKM perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian	Data nilai IKM perangkat daerah didapat dari hasil survei	Nilai	85	85	87	90	95	Sekretariat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	51,44	51,55	BKPSDM

26. SEKRETARIAT DPRD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Rata-rata nilai kepuasan terhadap anggota DPRD	Nilai kepuasan terhadap anggota DPRD didapat dari hasil survei	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Persentase terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Jumlah Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD yang terlaksana ----- X 100% Jumlah seluruh tugas dan fungsi DPRD	Jumlah tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terlaksana didapat dari jumlah hasil pelaksanaan kegiatan Jumlah seluruh tugas dan fungsi didapat dari Perbup no 18 Tahun 2023	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	54,17	55,00	BKPSDM

27. INSPEKTORAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pengendalian Intern dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP	Data didapat dari hasil penilaian BPKP	Predikat	Level 2 (2,3)	Level 2 (2,5)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,3)	BPKP
2.	Meningkatnya Kualitas APIP yang Profesional	Peningkatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP	Data didapat dari hasil penilaian BPKP	Predikat	Level 2 (2,3)	Level 2 (2,7)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,3)	BPKP

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		awaban APBD		pertanggungjawaban APBD							
		Persentase Toleransi Deviasi Penyerapan Belanja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Anggaran aktual}-\text{Anggaran yang ditargetkan}}{\text{Anggaran yang ditargetkan}} \times 100\%$	Data Anggaran aktual-Anggaran yang ditargetkan Didapat dari RKPD	%	-13,12	-12,46	-11,84	-11,18	-10,5	BPKAD
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	realisasi waktu penyampaian Laporan barang milik daerah (BMD) sebelum batas waktu penyampaian	Data realisasi waktu penyampaian Laporan barang milik daerah (BMD) sebelum batas waktu penyampaian didapat dari tanggal penandatanganan laporan BMD	Predikatif	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikatif	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	52,73	53,00	BKPSDM

30. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan Kualitas Sistem Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Potensi Pendapatan	Jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) ----- X 100% Jumlah potensi Pendapatan Daerah	Data jumlah PAD didapat dari LRA Data jumlah potensi pendapatan daerah Berita Acara ekstensi-Intens	%	0,9	1	1,5	1,8	2	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	52,37	53,00	BKPSDM

31. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.		Persentase ASN yang Mempunyai Nilai SKP Berkategori Baik	$\frac{\text{ASN yang mempunyai penilaian Prestasi kerja minimal berkategori baik tahun -n}}{\text{Jumlah ASN tahun -n}} \times 100\%$	Data ASN yang mempunyai penilaian Prestasi kerja minimal berkategori baik dan jumlah ASN didapat dari aplikasi SIASN	%	70,84	80,08	81,08	82,08	83,08	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sesuai Formasi	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan aparatur yang ditetapkan Kemenpan RB}}{\text{Jumlah kebutuhan sesuai usul formasi yang disampaikan ke Kemenpan RB}} \times 100\%$	<p>Data umlah kebutuhan aparatur yang ditetapkan Kemenpan RB didapat dari jumlah formasi yang diberikan KemenpanRB</p> <p>Data Jumlah kebutuhan sesuai usul formasi yang disampaikan ke Kemenpan RB didapatkan dari dokumen usul pengadaan pegawai</p>	%	50,25	60,25	61,25	62,25	63,25	
		Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti diklat tahun -n lulus dengan predikat minimal memuaskan}}{\text{Jumlah ASN yang}} \times 100\%$	Data Jumlah aparatur yang mengikuti diklat tahun -n lulus dengan predikat minimal memuaskan dan Jumlah ASN yang	%	50,23	70,92	71,92	72,92	73,92	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Pelatihan Lulus dengan Predikat Minimal Memuaskan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	mengikuti diklat didapat dari hasil rekapitulasi BKPSDM							
		Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Data jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi didapat dari rekapitulasi BKPSDM Data jumlah ASN didapat dari aplikasi SI ASN	%	40,23	50,92	51,92	53,92	53,92	
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	60,63	61,00	BKPSDM

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	

32. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.		Persentase Desa Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki sistem ketangguhan bencana}}{\text{Jumlah desa rawan bencana}} \times 100\%$	<p>Data desa yang memiliki sistem ketangguhan bencana didapat dari penetapan oleh BPBD</p> <p>Data Jumlah desa rawan bencana didapat dari dokumen KLHS</p>	%	0,00	0,00	52	65	75	BPBD
		Persentase Unsur Stakeholders Penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah unsur stakeholder PB yang pernah terlibat}}{\text{Jumlah unsur stakeholder PB yang dapat dilibatkan}} \times 100\%$	<p>Data Jumlah unsur stakeholder PB yang pernah terlibat didapat dari hasil kegiatan penanggulangan bencana</p> <p>Data jumlah unsur stakeholder PB yang dapat dilibatkan didapat</p>	%	0,00	0,00	60	65	70	BPBD

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				dari hasil penilaian BPBD							
		Persentase Peralatan Penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah Peralatan yang tersedia}}{\text{Jumlah peralatan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	<p>Data Peralatan yang tersedia didapat dari laporan BMD</p> <p>Data jumlah peralatan yang dibutuhkan didapat dari perhitungan berdasarkan SOP penanggulangan bencana</p>	%	0,00	0,00	50	60	70	BPBD
		Persentase Logistik Penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah logistik yang tersedia}}{\text{Jumlah logistik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	<p>Data jumlah logistic yang tersedia berdasarkan rekapitulasi BPBD</p> <p>Data Jumlah logistic yang dibutuhkan didapat berdasarkan perhitungan estimasi kebutuhan oleh BPBD</p>	%	0,00	0,00	95	95	100	BPBDs
2.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggara	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
	an Pemerintahan										
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	53,07	54,5	BKPSDM

33. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya penguatan ideologi Pancasila dan kewaspadaan nasional di Kabupaten Lampung Utara	Persentase Pemahaman Ideologi Pancasila di Kab. LU	Jumlah pelajar yang dinyatakan lolos pemahaman ideologi Pancasila pada seleksi paskibra ----- X 100% Jumlah seluruh pendaftar pada seleksi paskibra	Data umlah pelajar yang dinyatakan lolos pemahaman ideologi Pancasila pada seleksi paskibra didapat dari hasil seleksi paskibra Data Jumlah seluruh pendaftar pada seleksi paskibra didapat dari jumlah pendaftar seleksi paskibra	Persen	50	51	52	53	54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Penanganan Konflik Agama/Suku di Kab. LU	$\frac{\text{Jumlah penanganan Konflik agama/suku Tahun } n}{\text{Jumlah Konflik agama/suku Tahun } n} \times 100\%$	<p>Data jumlah penanganan konflik agama/suku tahun n didapat dari data jumlah kegiatan penanganan Konflik agama/suku yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Data jumlah konflik agama/suku didapat dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik</p>	Perse n	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya rasa aman dan tentram bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara	Persentase Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah penanganan Konflik sosial Tahun } n}{\text{Jumlah Konflik sosial Tahun } n} \times 100\%$	<p>Data jumlah penanganan konflik sosial didapat dari data jumlah kegiatan penanganan Konflik sosial yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Data jumlah konflik sosial hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik</p>	Perse n	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lemvaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melapor	$\frac{\text{Jumlah Ormas dan LSM yang melapor di tahun n}}{\text{Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar di tahun n}} \times 100\%$	<p>Data jumlah Ormas dan LSM yang melapor di tahun n didapat dari hasil rekapitulasi laporan Ormas dan LSM oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik</p> <p>Data Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar di tahun n didapat dari data Ormas dan LSM pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik</p>	Perse n	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara}}{\text{Jumlah daftar pemilih tetap}} \times 100$	<p>Data umlah pemilih yang menggunakan hak suara Didapat dari hasil rekapitulasi KPU</p> <p>Data jumlah daftar pemilih tetap diambil dari dat KPU</p>	Perse n	N/A	N/A	N/A	N/A	80	KPU
3.	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahun n didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
						2020	2021	2022	2023	2024	
				Data jumlah konflik didapat dari jumlah laporan konflik yang masuk ke kecamatan							
	Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai indikator perencanaan kinerja + nilai indikator pengukuran kinerja + nilai indikator laporan kinerja + nilai indikator evaluasi	Data Nilai AKIP tahunan didapat dari hasil evaluasi oleh Inspektorat	Predikat	C	CC	B	B	B	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Hasil nilai indikator kualifikasi + Hasil nilai indikator Kompetensi + Hasil nilai indikator Kinerja + Hasil nilai indikator disiplin	Data diambil dari aplikasi SI ASN	Nilai Indeks	NA	NA	NA	48,00	49,00	BKPSDM

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI